

ABSTRAK

Pemanfaatan tanah kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit oleh para pelaku usaha sering kali terjadi permasalahan yakni pada aspek perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan permasalahan terkait daya dukung lingkungan wilayah yang tidak memadai serta tidak sesuai dengan kebijakan moratorium perkebunan kelapa sawit namun tetap dijadikan objek pelepasan sehingga berimplikasi pada kerusakan lingkungan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kedudukan hukum penerapan dan penerbitan izin pelepasan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan upaya hukum terkait penerbitan izin pelepasan kawasan hutan serta peranan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa pelepasan kawasan hutan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan, penataan ruang, serta kebijakan moratorium perkebunan kelapa sawit. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Hasil Penelitian ini bahwa Kedudukan hukum penerapan pelepasan kawasan hutan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang *juncto* Instruksi Presiden No 8 tahun 2018 Tentang Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit bahwa SK tersebut terbit berada pada kawasan hutan yang masih produktif. Implikasi hukum terhadap tindakan hukum penerbitan izin tersebut adalah cacat hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan penyelesaian sengketa menggunakan diskresi berdasarkan kewenangannya dengan membatalkan izin lokasi atau dengan melalui jalur litigasi yakni mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang mengadili penyelesaian sengketa penerbitan keputusan pemerintah melalui pengadilan tata usaha negara dengan gugatan pembatalan Penerbitan SK Nomor 517/MENLHK/Setjen/ Pla.2/11/2018 dan SK Nomor 2/1/PKH/PMDN/2018 kemudian dengan jalur non litigasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang – Undangan Melalui Mediasi. Peranan Pemerintah Daerah dengan tetap melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara bijaksana agar tidak merusak lingkungan hidup. Peranan Tata ruang sebagai wujud dari proses penataan ruang pada intinya merupakan sarana pembangunan berkelanjutan

ABSTRACT

The Utilization of forest land area for palm plantations by business actors often occurs problems, namely in the aspect of permission which is not in appropriate with regional spatial plans and issues related to regional environmental carrying capacity that are inadequate and not in accordance with the moratorium policy of oil palm plantations, yet these remain as the object of release thus has the implications on environmental damage. The purpose of this research is to analyze and find out the legal position of the application and issuance of forest area release licenses based on applicable laws and legal remedies related to the issuance of forest area release licenses and the role of local governments in resolving disputes over the release of forest areas.

The approach method applied in this discussion is the normative juridical method. The normative juridical method is a study that emphasizes on the science of law and conducts a positive legal inventory which is related to the release of forest areas, spatial planning, and moratorium policies on palm plantations. The specification of this research is descriptive analysis, which is describing and analyzing problems based on Forestry Law Number 41 of 1999, Spatial Planning Law Number 26 of 2007, Environmental Protection and management Law Number 32 of 2009, and Presidential Instruction Number 8 of 2018 concerning Evaluation and Delays in Licensing of Palm Plantations and Increasing Productivity of Palm Plantations.

The results of this study that the legal position of the application of forest area release is contradictive with Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning in conjunction with Presidential Instruction No. 8 of 2018 concerning Evaluation and Delays in Licensing of Palm Oil Plantations and Increasing Productivity of Oil Palm Plantation that the decree issued in the area of productive forest. The implications toward the legal actions of issuing these licenses are legally flawed. Legal remedies that can be resolved using a discretion based on their authority by canceling the location permit or by going through litigation namely submitting a lawsuit to the court authorized to adjudicate dispute resolution of the issuance of government decisions through the state administrative court with a claim to cancel the Issuance of THE DECREE Number 517 / MENLHK / Secretariat / Pla.2 / 11/2018 and The Decree Number 2/1 / PKH / PMDN / 2018 then by non-litigation path based on the Minister of Law and Ham Regulation Number 02 Year 2019 Regarding the Settlement of Disharmonization of Laws - Invitation through Mediation. The role of the Regional Government by continuing to carry out planning, utilization and control of spatial planning wisely so as not to damage the environment. The role of Spatial Planning as a manifestation of the spatial planning process is essentially a means of sustainable development